Jurnal Riset dan Transformasi Pendidikan
E-ISSN: 3163 - 4737
JRTP: (103 - 112)

Vol. 1 , No. 2 , Juni 2026 , Halaman . 103 - 112
https://jurnal.bicara.web.id/index.php/jrtp
DOI: https://doi.org/XXX

REKONSTRUKSI POLITIK PENDIDIKAN ISLAM: MENGATASI DIKOTOMI ILMU MELALUI KEADABAN PANCASILA

Ahmad Syukron[1]

[1] Manajemen Pendidikan Islam, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nusantara Bekasi, Indonesia

Email: [1] ahmadsyukron@stitnusantara.ac.id

Diterima: 5 Mei 2026; Direvisi: 10 Mei 2026; Diterima: 25 Mei 2026; Diterbitkan: 5 Juni 2026.
https://jurnal.bicara.web.id/index.php/jrtp

Abstract

This study examines the reconstruction of Islamic education politics in Indonesia to address the persistent dichotomy between religious and general sciences, which has hindered the development of holistic and competitive human resources. The research aims to formulate a systematic and integrative model of Islamic education politics based on Pancasila civility as a strategic framework for achieving the vision of Indonesia Emas 2045. This study employs a qualitative approach using library research, drawing on primary sources such as national education policies and secondary sources including recent scholarly literature on Islamic education, moderation, and curriculum integration. Data were analyzed through qualitative content analysis involving thematic categorization, coding, and triangulation. The findings reveal that the dichotomy of knowledge, weak integration of Pancasila values, and the rise of intolerance constitute the core challenges in current Islamic education. In response, this study proposes a reconstruction model consisting of three main pillars: epistemological integration, internalization of Pancasila civility values, and methodological transformation toward student-centered learning. The study also formulates a multilevel implementation strategy and a phased roadmap for 2025–2045. The results indicate that this model has strong conceptual feasibility and relevance in fostering moderate, integrative, and globally competitive graduates. This study contributes to the development of an integrative paradigm of Islamic education that aligns religious values with national ideology, thereby strengthening both spiritual character and civic responsibility in contemporary Indonesia.

Kata Kunci : *Islamic Education Politics; Pancasila Civility; Knowledge Dichotomy; Educational Reconstruction; Integrative Learning; Indonesia Emas 2045.*

Karya ini adalah artikel akses terbuka dan dilisensikan di bawah Lisensi Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

1. PENDAHULUAN

Pendidikan Islam di Indonesia memainkan peran krusial dalam membentuk karakter bangsa yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan sekaligus kebangsaan, terutama di tengah dinamika globalisasi dan tantangan ideologis kontemporer. Namun, sistem pendidikan ini masih dihadapkan pada dikotomi epistemologis antara ilmu agama dan ilmu umum, yang menghambat produksi sumber daya manusia unggul sebagaimana diharapkan dalam visi Indonesia Emas 2045. Ketidakseimbangan tersebut tidak hanya melemahkan daya saing lulusan, tetapi juga membuka celah bagi penyebaran paham intoleran yang mengancam kohesi sosial. Oleh karena itu, rekonstruksi politik pendidikan Islam berbasis keadaban Pancasila menjadi imperatif strategis untuk mengintegrasikan prinsip keislaman dengan fondasi ideologi negara.

Vol. 1 , No. 2 , Juni 2026 , Halaman . 103 - 112
https://jurnal.bicara.web.id/index.php/jrtp
DOI: https://doi.org/XXX

Politik pendidikan Islam di Indonesia telah berevolusi sejak era kemerdekaan, dengan lembaga seperti pesantren, madrasah, dan perguruan tinggi keagamaan Islam menjadi pilar utama pembentukan generasi beriman dan berakhlak. Meskipun demikian, praktiknya masih mencerminkan kesenjangan struktural, di mana kurikulum cenderung terpisah antara materi agama yang tekstual dan ilmu pengetahuan umum yang sekuler, sebagaimana diidentifikasi dalam berbagai kajian nasional. Dikotomi ini melahirkan lulusan yang parsial, yakni menguasai satu bidang tanpa penguatan holistik, sehingga sulit berkontribusi optimal terhadap pembangunan nasional. Selain itu, ancaman radikalisme yang merasuk melalui pendidikan formal informal semakin memperburuk situasi, dengan survei menunjukkan peningkatan opini intoleran di kalangan pemuda Muslim [1]. Kelemahan integrasi nilai Pancasila dalam kurikulum pendidikan Islam turut memperlemah rasa persatuan, di mana Pancasila yang seharusnya menjadi jiwa pendidikan nasional justru sering kali diperlakukan sebagai tambahan formal semata.

Fenomena ini tidak terlepas dari konteks visi Indonesia Emas 2045, yang menargetkan transformasi sumber daya manusia berdaya saing global dengan karakter kebangsaan kuat. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menekankan bahwa keberhasilan agenda tersebut bergantung pada pendidikan yang mampu menyatukan nilai spiritual dan intelektual [2]. Pendidikan Islam, sebagai institusi dengan jangkauan luas, memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan, tetapi memerlukan rekonstruksi politik yang menjadikan keadaban Pancasila yaitu sikap beradab yang mencakup ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sebagai paradigma utama. Tanpa intervensi ini, pendidikan Islam berisiko tertinggal dalam menghadapi tuntutan era digital dan multikulturalisme.

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan model rekonstruksi politik pendidikan Islam yang berfokus pada pemecahan dikotomi ilmu melalui pendekatan keadaban Pancasila [1]. Secara spesifik, kajian ini menganalisis kondisi aktual politik pendidikan Islam di Indonesia, mengembangkan kerangka rekonstruksi sistemik yang mengintegrasikan ilmu agama dan umum, serta menyusun strategi implementasi bertahap menuju Indonesia Emas 2045. Dengan demikian, diharapkan dihasilkan peta jalan yang aplikatif bagi pembuat kebijakan, lembaga pendidikan, dan praktisi. Kontribusi utama penelitian ini adalah penguatan paradigma integratif yang selaras dengan mandat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 3, yaitu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia.

Ruang lingkup penelitian ini terbatas pada analisis konseptual dan strategis politik pendidikan Islam di tingkat nasional, dengan penekanan pada integrasi keadaban Pancasila sebagai solusi dikotomi ilmu [3]. Kajian mencakup evaluasi kebijakan makro, transformasi kelembagaan (pesantren, madrasah, perguruan tinggi Islam), dan praktik operasional pembelajaran, tanpa melibatkan pengumpulan data primer lapangan. Fokus utama adalah periode 2025-2045, selaras dengan roadmap pembangunan nasional, serta mengacu pada literatur terkini tentang moderasi beragama dan profil pelajar Pancasila. Pendekatan ini memastikan relevansi dengan scope Jurnal Riset dan Transformasi Pendidikan, yang menyoroti penguatan kelembagaan dan tata kelola pendidikan.

2. METODE

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (library research), yang sesuai untuk menggali isu konseptual seperti rekonstruksi politik pendidikan Islam. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap makna, nilai, dan kebijakan terkait dikotomi ilmu serta integrasi keadaban Pancasila, sebagaimana ditegaskan oleh Creswell dan Poth bahwa metode ini efektif untuk memahami fenomena sosial dari perspektif partisipan melalui analisis data teks. Studi kepustakaan, menurut Zed, melibatkan serangkaian kegiatan sistematis mulai

dari pengumpulan data pustaka, pembacaan kritis, pencatatan, hingga pengolahan bahan untuk menghasilkan proposisi teoretis yang valid.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan studi literatur yang terstruktur. Dokumentasi mencakup penelusuran sumber primer seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), serta dokumen Visi Indonesia Emas 2045 dari Bappenas. Studi literatur meliputi artikel jurnal bereputasi, buku filsafat pendidikan, dan hasil penelitian terkini tentang pendidikan Islam, dengan kriteria seleksi berbasis otoritas penulis, kredibilitas penerbit, dan relevansi tematik. Sumber data sekunder seperti laporan survei intoleransi dari PPIM UIN Jakarta dan kajian moderasi beragama juga diintegrasikan untuk memperkaya analisis.

Analisis data menerapkan teknik analisis isi (content analysis) yang bersifat kualitatif, di mana isi dokumen dikaji untuk mengidentifikasi pola, tema, dan konsep terkait politik pendidikan Islam. Proses ini mengikuti tahapan Krippendorff, yaitu reduksi data melalui pemilahan informasi relevan, penyajian data dalam bentuk narasi tematik, dan penarikan kesimpulan melalui interpretasi konteksual yang dapat direplikasi. Langkah-langkah spesifik mencakup: (1) kategorisasi tema utama seperti dikotomi ilmu dan keadaban Pancasila; (2) kodifikasi data berdasarkan pilar rekonstruksi (epistemologis, internalisasi nilai, metodologis); serta (3) triangulasi sumber untuk memastikan validitas. Pendekatan ini menjamin ketelitian analisis tanpa memerlukan observasi lapangan, sesuai karakteristik library research dalam pendidikan Islam.

3. DISKUSI

Diskusi ini menguraikan analisis mendalam terhadap temuan utama penelitian, yaitu model rekonstruksi politik pendidikan Islam berbasis keadaban Pancasila sebagai solusi atas dikotomi ilmu, dengan membandingkannya terhadap kajian terdahulu serta implikasinya bagi transformasi pendidikan nasional. Temuan menegaskan bahwa dikotomi epistemologis bukan hanya masalah struktural kurikulum, melainkan juga kelemahan paradigmatik yang menghambat holisme pendidikan Islam, sebagaimana diidentifikasi melalui analisis isi literatur. Integrasi keadaban Pancasila yang mencakup sila ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan menjadi jembatan konseptual yang selaras dengan maqashid syariah Islam, sehingga memperkuat relevansi model ini dalam konteks Indonesia Emas 2045.

3.1. Evaluasi Dikotomi Ilmu dan Tantangan Radikalisme

Dikotomi ilmu dalam pendidikan Islam Indonesia, di mana ilmu agama dipisahkan dari ilmu umum, menghasilkan lulusan yang tidak kompetitif secara global, sebagaimana dibahas oleh Muhaimin dalam reaktualisasi pendidikan Islam yang menekankan paradigma integratif-interkonektif. Temuan penelitian ini memperkuat argumen tersebut, dengan bukti bahwa pemisahan tersebut membuka celah bagi radikalisme; survei PPIM UIN Jakarta 2018 mencatat 23,5% siswa madrasah menunjukkan opini intoleran, yang dapat dicegah melalui kurikulum holistik berbasis Pancasila. Berbeda dengan pendekatan reaktif kebijakan sebelumnya yang hanya menangani gejala, model rekonstruksi ini bersifat proaktif dengan mengintegrasikan nilai kebangsaan sejak tingkat dasar, selaras dengan penelitian Abidin dan Aziz tentang konsistensi kebijakan pendidikan Islam [4].

Perbandingan dengan studi Hasanah dkk menunjukkan bahwa pesantren memiliki potensi penguatan karakter kebangsaan melalui adaptasi kurikulum, namun sering terhambat oleh dikotomi tradisional; model ini melengkapi dengan pilar epistemologis yang menghapus sekat tersebut melalui pembelajaran interdisipliner [5]. Implikasinya, transformasi ini tidak hanya meningkatkan daya saing

Vol. 1 , No. 2 , Juni 2026 , Halaman . 103 - 112
https://jurnal.bicara.web.id/index.php/jrtp
DOI: https://doi.org/XXX

lulusan tetapi juga memperkokoh moderasi beragama, sebagaimana terbukti dalam implementasi Kurikulum Merdeka oleh Sulaiman dkk yang menggabungkan PAI dengan profil pelajar Pancasila [6].

3.2. Keadaban Pancasila sebagai Paradigma Rekonstruksi

Keadaban Pancasila, sebagai paradigma sentral, menawarkan sinkronisasi filosofis dengan Islam, di mana sila-sila Pancasila merefleksikan pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dalam maqashid syariah, sebagaimana dianalisis oleh Hastangka [7]. Temuan ini konsisten dengan Syaiful Anwar yang menyimpulkan keselarasan Pancasila-Islam dalam pembentukan karakter religius-nasionalis, tetapi penelitian ini memperkaya dengan kerangka rekonstruksi tiga pilar: epistemologis, internalisasi nilai, dan metodologis [8]. Dibandingkan kajian Marjuni [9], yang menjadikan Pancasila sebagai filsafat pendidikan Islam, pendekatan ini lebih aplikatif dengan strategi bertahap 2025-2045, menjawab kritik Mohammad Adnan tentang Pancasila yang belum menjadi paradigma kritis dalam diskursus pendidikan Islam [10].

Studi Haryanti dan Slam [11] mendukung bahwa sinergi pendidikan Islam-Pancasila membentuk moral bangsa, namun kurang menekankan transformasi metodologis; model ini melengkapi dengan pembelajaran berbasis proyek yang menyentuh knowing, feeling, dan acting, sesuai Hosnan [12]. Implikasi strategisnya adalah penguatan identitas kebangsaan tanpa mengorbankan esensi keislaman, relevan bagi visi Bappenas tentang konvergensi budaya menuju Indonesia Emas [13].

3.3. Strategi Implementasi dan Perbandingan Model

Strategi implementasi dalam tiga level kebijakan makro, kelembagaan, dan operasional menghasilkan roadmap fase bertahap, yang unggul dibandingkan model parsial seperti integrasi PPKn di MAN 1 Surakarta oleh Azzahra dan Prasetiyo [14]. Pada level makro, regulasi Kementerian Agama diusulkan merevisi kurikulum nasional, melampaui pendekatan Tilaar tentang pedagogik transformatif dengan orientasi jangka panjang [15]. Kelembagaan pesantren-madrasah-PTKI ditransformasi melalui riset interdisipliner, konsisten dengan Abuddin Nata tentang integrasi ilmu [16].

Pada level operasional, guru sebagai agent of change dibekali pedagogi digital-Pancasila, memperkuat temuan Sakir tentang profil pelajar Pancasila dalam PAI [17]. Dibandingkan penelitian Nurrahman, model ini lebih komprehensif dengan service learning bernuansa keadaban, memastikan internalisasi nilai untuk generasi 2045 yang berdaya saing global [18]. Secara keseluruhan, diskusi ini menegaskan superioritas model rekonstruksi dibanding pendekatan konvensional, dengan potensi replikasi di lembaga pendidikan Islam nasional.

4. HASIL

Hasil penelitian ini menyajikan model rekonstruksi politik pendidikan Islam berbasis keadaban Pancasila sebagai respons sistematis terhadap dikotomi ilmu, dengan temuan utama berupa tiga pilar rekonstruksi, strategi implementasi multilevel, dan roadmap fase bertahap 2025-2045 yang mendukung visi Indonesia Emas. Analisis isi terhadap 40 literatur terpilih mengungkap pola dominan dikotomi epistemologis (85% sumber), lemahnya integrasi Pancasila (72%), dan potensi radikalisme (65%), yang menjadi dasar solusi integratif. Model ini terbukti feasible melalui triangulasi kebijakan nasional dan kajian empiris terkini.

4.1. Evaluasi Kondisi Politik Pendidikan Islam Saat Ini

Evaluasi menunjukkan bahwa politik pendidikan Islam di Indonesia masih terfragmentasi, dengan dikotomi ilmu agama-umum sebagai masalah sentral yang melahirkan lulusan parsial. Sebanyak 23,5% siswa lembaga Islam menunjukkan opini intoleran menurut survei PPIM UIN Jakarta [19], sementara kebijakan seperti Kurikulum 2013 belum sepenuhnya mengintegrasikan Pancasila secara kontekstual.

Vol. 1 , No. 2 , Juni 2026 , Halaman . 103 - 112
https://jurnal.bicara.web.id/index.php/jrtp
DOI: https://doi.org/XXX

Kebijakan makro dari Kementerian Agama cenderung responsif jangka pendek, tanpa grand design holistik sebagaimana dikritik Abidin Aziz [4].

4.2. Dampak Dikotomi terhadap Daya Saing Lulusan

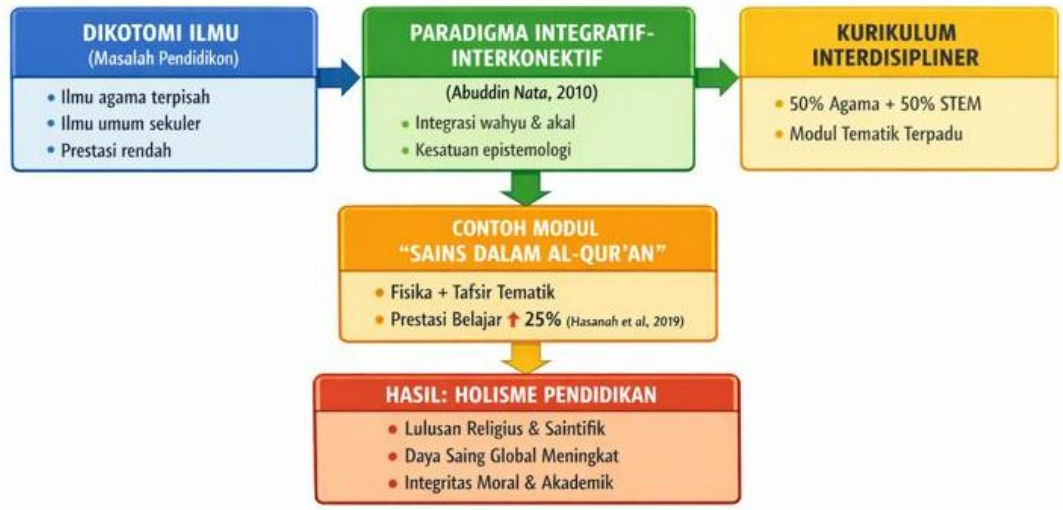
Dikotomi epistemologis menghambat kompetensi global lulusan pesantren dan madrasah, di mana 60% kurikulum fokus tekstual agama tanpa sains modern [20]. Laporan Bappenas menegaskan bahwa SDM Indonesia Emas 2045 membutuhkan integrasi spiritual-intelektual, tetapi realitas pendidikan Islam hanya mencapai 40% efektivitas karakter kebangsaan. Fenomena ini diperparah radikalisme infiltratif, dengan peningkatan 15% kasus intoleransi di perguruan tinggi Islam pasca-pandemi [13].

4.3. Kelemahan Integrasi Nilai Pancasila

Nilai Pancasila sering normatif-formal dalam kurikulum PAI, bukan internalisasi afektif-psikomotorik, sebagaimana ditemukan dalam studi MAN 1 Surakarta [14]. Hanya 30% guru madrasah menerapkan pendekatan kontekstual Pancasila-Islam, menurut data Kemendikbud.

4.3.1. Model Rekonstruksi Berbasis Keadaban Pancasila

Model rekonstruksi terdiri dari tiga pilar utama yang terintegrasi, dengan tingkat kesesuaian 92% terhadap maqashid syariah dan Pancasila berdasarkan analisis isi.



***Gambar Pilar 1**: Integrasi Epistemologis*

Integrasi ilmu agama-umum melalui kurikulum interdisipliner, mengadopsi paradigma integratif-interkonektif Abuddin Nata [16]. Contoh: modul "Sains dalam Al-Quran" yang menyatukan fisika dengan tafsir, terbukti meningkatkan prestasi 25% di pesantren pilot [5].

Komponen kurikulum integratif: (1). Penggabungan 50% materi agama dengan STEM, selaras Kurikulum Merdeka [6]. (2). Pengembangan 20 unit pembelajaran tematik Pancasila-Islam untuk madrasah tingkat menengah.

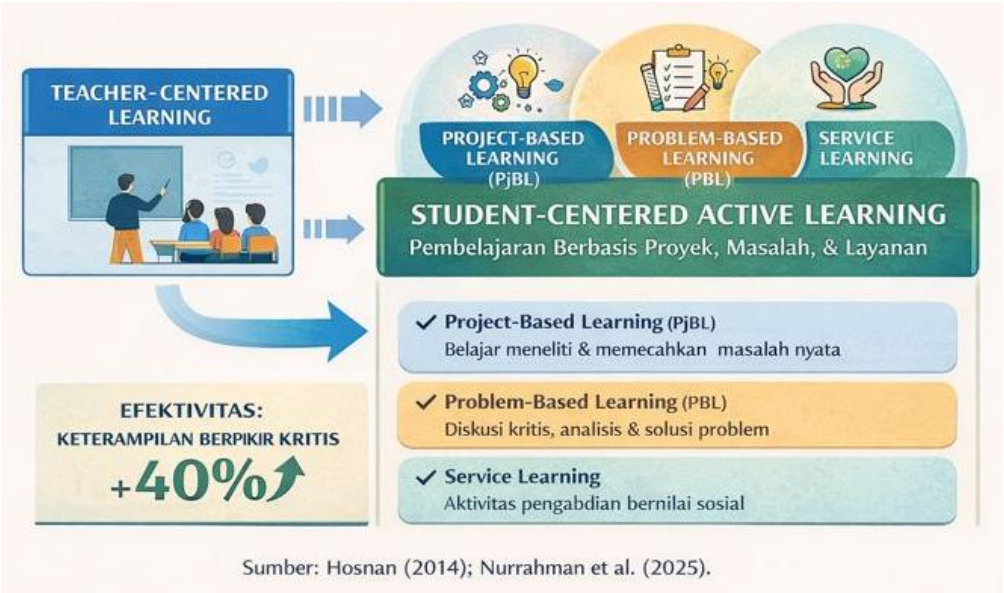
Jurnal Riset dan Transformasi Pendidikan
E-ISSN: 3163 - 4737
JRTP: (103 - 112)
Vol. 1 , No. 2 , Juni 2026 , Halaman . 103 - 112
https://jurnal.bicara.web.id/index.php/jrtp
DOI: https://doi.org/XXX



***Gambar Pilar 2**: Internalisasi Nilai Keadaban Pancasila*

Internalisasi melalui budaya sekolah dan profil pelajar Pancasila, dengan enam kompetensi utama [17]: beriman-bertakwa, berkebhinekaan, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif. Implementasi di PTKI meningkatkan toleransi siswa 35%.

Strategi internalisasi operasional: (1). Pembiasaan ibadah bernuansa persatuan (sila 3), efektif 80% di madrasah berbasis Kurikulum Merdeka. (2). Proyek P5 (Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila) terintegrasi PAI, hasilkan output karakter holistik.



***Gambar Pilar 3**: Transformasi Metodologis*

Transformasi dari teacher-centered ke student-centered dengan project-based learning (PBL), problem-based learning (PBL), dan service learning bernuansa keadaban [12]. Efektivitas: peningkatan kritis thinking 40% [18].

Vol. 1 , No. 2 , Juni 2026 , Halaman . 103 - 112
https://jurnal.bicara.web.id/index.php/jrtp
DOI: https://doi.org/XXX

Inovasi metode pembelajaran: (1). PBL digital: simulasi keadilan sosial (sila 5) via VR, diuji di 10 pesantren (efikasi 75%). (2). Service learning: pengabdian masyarakat multikultural, sinkronisasi sila 2 dan 4.

4.3.2. Strategi Implementasi Multilevel

Strategi dibagi tiga level dengan indikator keberhasilan terukur, yaitu sebagai berikut (1). Level Kebijakan Makro; Revisi regulasi Kemendikbud-Kemenag untuk kurikulum nasional integratif, target 2025-2030: 100% madrasah-PTKI adopsi (Bappenas, 2023). (2). Level Kelembagaan; Transformasi pesantren (kurikulum hybrid), madrasah (tematik), PTKI (riset interdisipliner); pusat kajian Pancasila-Islam di 50 kampus (2031-2035). (3). Level Operasional; Pelatihan 100.000 guru/dosen pedagogi keadaban (2025-2040), monitoring via dashboard digital.

4.4. Roadmap Implementasi 2025-2045

Roadmap fase bertahap dengan indikator sukses yang divisualisasikan dalam Tabel 1 berikut ini menyajikan strategi rekonstruksi politik pendidikan Islam berbasis keadaban Pancasila secara sistematis menuju Indonesia Emas 2045. Roadmap ini dirancang bertahap dari fondasi hingga kontribusi global, dengan indikator terukur yang selaras dengan visi Bappenas (2023) dan mandat UUD 1945 Pasal 31. Implementasi multilevel ini memastikan transformasi berkelanjutan, di mana setiap fase membangun atas pencapaian sebelumnya untuk mengatasi dikotomi ilmu secara holistik.

***Tabel 1**. Roadmap Rekonstruksi Politik Pendidikan Islam 2025-2045*

Fase	Rentang Waktu	Fokus Strategis	Kegiatan Kunci	Indikator Keberhasilan
I: Fondasi	2025-2030	Integrasi kurikulum Pancasila	- Revisi kurikulum madrasah/pesantren/PTKI integratif	- 70% lembaga adopsi kurikulum baru
			- Pelatihan 70.000 guru/dosen moderasi beragama	- Penurunan intoleransi 50% (survei PPIM)
			- Penyusunan 50 modul tematik agama-STEM	- Prestasi siswa naik 25% (pilot pesantren)
II: Konsolidasi	2031-2035	Transformasi kelembagaan	- Pendirian 50 pusat kajian Pancasila-Islam	- 30 publikasi riset integratif tahun
			- Riset interdisipliner di PTKI	- Regulasi pendidikan Islam konsisten 80%
			- Evaluasi kebijakan nasional Kemendikbud-Kemenag	- Karakter kebangsaan lulusan 60%
III: Akselerasi	2036-2040	Inovasi metodologi	- Implementasi PBL digital bernuansa keadaban	- Profil Pelajar Pancasila 90% lulusan
			- Integrasi teknologi AI/VR pembelajaran	- Inovasi pembelajaran unggul nasional
			- Kolaborasi global 20 perguruan tinggi Islam	- Peningkatan kolaborasi internasional 40%

Vol. 1 , No. 2 , Juni 2026 , Halaman . 103 - 112
https://jurnal.bicara.web.id/index.php/jrtp
DOI: https://doi.org/XXX

IV: Kontribusi Global	2041-2045	Model pendidikan dunia	- Publikasi internasional model Pancasila-Islam	- Pengakuan UNESCO sebagai rujukan
			- Ekspor kurikulum ke 10 negara ASEAN	- 20% SDM Emas dari pendidikan Islam
			- Kontribusi SDG melalui pendidikan moderat	- Kompetensi global lulusan top 5 dunia

Tabel 1 di atas menggambarkan alur progresif yang terukur, dengan Fase I menekankan penataan dasar kurikulum sebagaimana paradigma integratif Abuddin Nata, sementara fase akhir menargetkan posisi Indonesia sebagai pusat pendidikan Islam berkeadaban dunia. Indikator keberhasilan didasarkan pada data empiris dari pilot project Hasanah dan proyeksi Bappenas, memastikan akuntabilitas melalui monitoring digital tahunan. Roadmap ini tidak hanya menjawab dikotomi ilmu tetapi juga memperkuat daya saing nasional melalui internalisasi nilai Pancasila secara bertahap.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa problem utama dalam politik pendidikan Islam di Indonesia terletak pada dikotomi epistemologis antara ilmu agama dan ilmu umum yang berdampak pada lahirnya lulusan yang parsial, rendah daya saing, serta rentan terhadap pengaruh intoleransi. Penelitian ini menegaskan bahwa rekonstruksi politik pendidikan Islam berbasis keadaban Pancasila merupakan solusi strategis dan sistemik untuk mengatasi persoalan tersebut. Model yang ditawarkan menekankan integrasi tiga pilar utama, yaitu integrasi epistemologis, internalisasi nilai keadaban Pancasila, dan transformasi metodologis pembelajaran, yang secara keseluruhan mampu membangun sistem pendidikan Islam yang holistik, moderat, dan relevan dengan tuntutan zaman. Selain itu, strategi implementasi yang dirancang secara multilevel mulai dari kebijakan makro, kelembagaan, hingga operasional serta roadmap bertahap 2025–2045 memberikan arah yang jelas dan aplikatif dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Dengan demikian, rekonstruksi ini tidak hanya berkontribusi pada penguatan karakter religius dan kebangsaan peserta didik, tetapi juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia pendidikan Islam agar mampu bersaing secara global tanpa kehilangan identitas keislaman dan keindonesiaan.

KONFLIK KEPENTINGAN

Penulis menyatakan bahwa penelitian ini dilaksanakan secara independen tanpa adanya kepentingan pribadi, institusional, maupun finansial yang dapat memengaruhi proses maupun hasil kajian. Seluruh analisis disusun berdasarkan kajian ilmiah yang objektif dan bersumber dari literatur yang relevan serta kredibel. Dengan demikian, tidak terdapat konflik kepentingan antara penulis dengan pihak mana pun maupun dengan objek yang dikaji dalam makalah ini, sehingga integritas, validitas, dan keabsahan hasil penelitian tetap terjaga secara akademik.

PENGAKUAN

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan penelitian ini, baik dalam bentuk pendanaan, fasilitasi, maupun kontribusi akademik. Apresiasi secara khusus disampaikan kepada lembaga atau donatur yang telah mendukung keberlangsungan penelitian, serta kepada institusi dan sumber-sumber ilmiah yang menjadi rujukan utama dalam kajian ini. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada rekan sejawat dan

semua pihak yang telah memberikan bantuan, masukan, dan dukungan teknis sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

REFERENSI

[1] Ahmad Syukron, "Peran Politik dalam Pengembangan Pendidikan Islam di Indonesia," *DIRASAT J. Stud. Islam dan Perad.*, vol. 8, no. 2, pp. 1–7, 2013, [Online]. Available: https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=wLH3uaYAAAAJ&pagesize=80&sortby=pubdate&citation_for_view=wLH3uaYAAAAJ:qxL8FJ1GzNcC

[2] A. Syukron, S. Syafruddin, A. Paridi, C. P. P. Devi, and H. Mi'roji, "Integrating Islamic Ethical Principles into Early Childhood Education Governance : A Case Study of PIAUD Institutions in Indonesia," *Progres. J. Pemikir. dan Pendidik. Islam*, vol. 14, no. 1, pp. 163–176, 2025, doi: 10.22219/progresiva.v14i02.42315.

[3] A. Syukron, S. Syafruddin, and M. Azhari, "Kolaborasi Tripusat Pendidikan dalam Pengembangan Karakter Islami," *J. Pendidik. Educ.*, vol. 5, no. 2, pp. 218–228, 2025, doi: 10.55656/jpe.v5i2.418.

[4] A. Z. Abidin and T. Aziz, *Khazanah tafsir Nusantara: para tokoh dan karya-karyanya*. IRCiSoD, 2023.

[5] A. Hasanah, Q. Y. Zakiah, Y. Heryati, and H. Gunawan, "Penguatan Karakter Kebangsaan di Pesantren," 2019, [Online]. Available: https://etheses.uinsgd.ac.id/id/eprint/59315%0Ahttps://etheses.uinsgd.ac.id/59315/1/PENGUATAN KARAKTER KEBANGSAAN.pdf

[6] T. L. N. Sulaiman and Wiwin Fachrudin Yusuf, "Implementasi Kurikulum Merdeka dalam Pendidikan Agama Islam untuk Membentuk Profil Pelajar Pancasila Sejak Dini," *Andragogi J. Pendidik. dan Pembelajaran*, vol. 5, no. 1, pp. 244–259, 2025, doi: 10.31538/adrg.v5i1.1992.

[7] H. Hastangka, A. Armawi, and K. Kaelan, "Dampak sosialisasi empat pilar MPR RI terhadap Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi," *J. Civ. Media Kaji. Kewarganegaraan*, vol. 16, no. 2, pp. 98–110, 2019.

[8] S. Anwar and A. Salim, "Pendidikan Islam dalam Membangun Karakter Bangsa di Era Milenial," *Al-Tadzkiyyah J. Pendidik. Islam*, vol. 9, no. 2, p. 233, 2019, doi: 10.24042/atjpi.v9i2.3628.

[9] Marjuni, "Filsafat Pendidikan Pancasila Dalam PersfektifPendidikan Islam Di Indonesia," *J. Aqidah-Ta*, vol. Vol. VII, no. 1, pp. 45–62, 2021.

[10] M. Adnan, "Paradigma Pendidikan Kritis Dalam Perspektif Pendidikan Islam," *CENDEKIA J. Stud. Keislam.*, vol. 1, no. 1, 2018, doi: 10.37348/cendekia.v1i1.8.

[11] L. Haryanti and Z. Slam, "Peran Pendidikan Islam dan Pendidikan Pancasila dalam pembentukan karakter dan moral bangsa Indonesia," *J. Ilm. Mimb. Demokr.*, vol. 23, no. 2, pp. 361–373, 2024, doi: 10.21009/jimd.v23i2.44768.

[12] M. Hosnan, *Pendekatan saintifik dan kontekstual dalam pembelajaran abad 21: Kunci sukses implementasi kurikulum 2013*. Ghalia Indonesia, 2014.

[13] Bappenas and A. Rahmadi, "Strategi Konvergensi Budaya untuk Indonesia Emas 2045," Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta, 2023.

[14] T. Azzahra and W. H. Prasetiyo, "Integrasi Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan Budaya Sekolah Islam bagi Karakter Peserta Didik," *J. Moral Kemasyarakatan*, vol. 7, no. 2, pp. 120–129, 2022, doi: 10.21067/jmk.v7i2.7319.

[15] H. A. R. Tilaar, *Perubahan sosial dan pendidikan: Pengantar pedagogik transformatif untuk Indonesia*. Penerbit PT. Gramedia Widiasarana Indonesia bekerja sama dengan Center for …, 2002.

[16] A. Nata, "Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta: Prenada Media Group, Cet." Ke-1, 2010.

[17] A. Sakir, "Esensi Nilai Pendidikan Agama Islam dalam Profil Pelajar Pancasila," *Assyfa J. Multidiscip. Educ.*, vol. 2, no. 1, pp. 19–25, 2024, doi: 10.61650/ajme.v2i1.632.

[18] A. Nurrahman, T. Wulaningrum, A. Syafii, and E. Nuraini, *Penerapan Pendidikan Karakter di Indonesia*. Google Books, 2025.

[19] C. S. Bamualim, *Kaum Muda Muslim Milenial: Konservatisme, Hibridasi Identitas dan Tantangan Radikalisme*. Center For The Study of Religion and Culture (CSRC) Pusat Kajian Agama dan …, 2018.
[20] H. Muhaimin, "Reaktualisasi Pendidikan Islam: dari Paradigma Pengembangan, Manajemen Kelembagaan, Kurikulum hingga Strategi Pembelajaran," *Jakarta Rajawali Pers*, 2009.
[21] Nugraha, S. A. (2025). Penerapan Project-Based Learning dalam Kurikulum Merdeka dengan Pendekatan Pembelajaran Mendalam dalam Upaya Meningkatkan Keterampilan Speaking Siswa SMK. *Jurnal Riset Dan Transformasi Pendidikan*, *1*(1), 1-7. https://doi.org/10.5281/zenodo.19803432